

**PENIADAAN PIDANA TERHADAP
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA YANG
DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN
JASA DI INDONESIA**

TESIS

Oleh :

ALEXSANDER ROY HAPPY HAMONANGAN

NPM : 202220252010



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

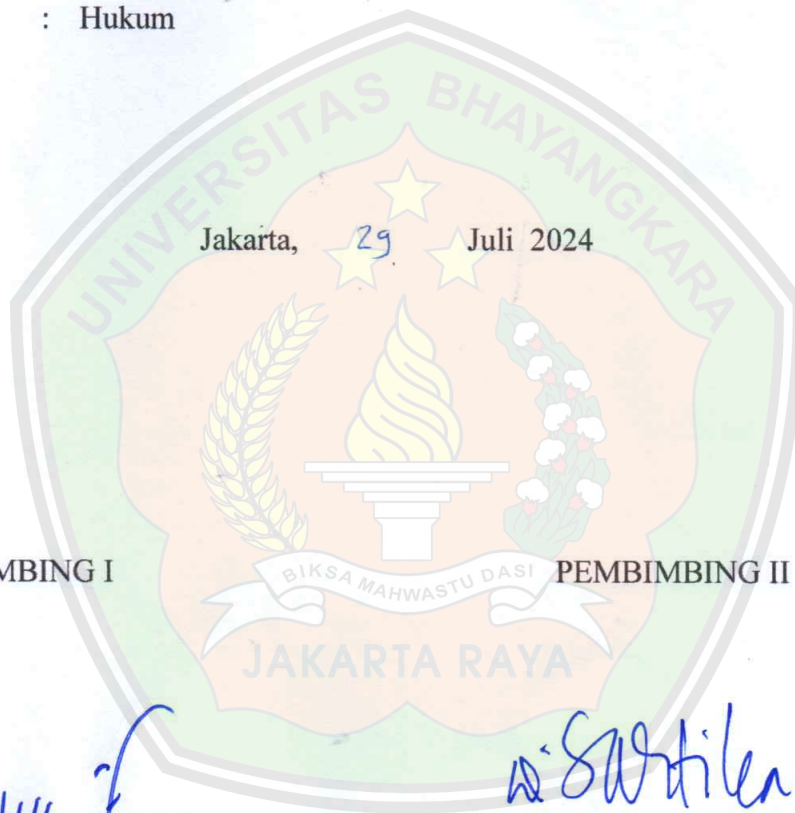
Judul Tesis : Peniadaan Pidana Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia

Nama Mahasiswa : Aleksander Roy Happy H

NIM : 202220252010

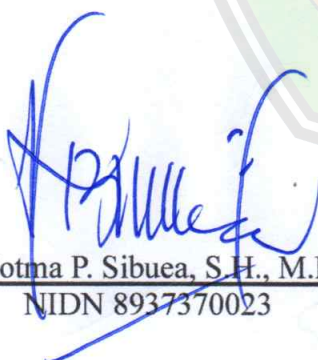
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.
NIDN 8937370023


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN 0312117102

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Peniadaan Pidana Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia

Nama Mahasiswa : Aleksander Roy Happy H

Nomor Pokok Mahasiswa : 202220252010

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 20 Juli 2024

Bekasi, Juli 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Prof. Dr. Alum Symbolon, S.H., M.Hum
NIDN. 0104046601

Penguji I : Dr. Hotma P Sibuea, S.H., M.H.
NIDN. 8937370023

Penguji II : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.
NIDN. 0319077606

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. St Laksanto Utomo, S.H., M.Hum
NIDN. 8976950022

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aleksander Roy Happy Hamonangan

Npm : 202220252010

TTL : Jakarta, 23 November 1987

Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul “ *Peniadaan Pidana Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia* “ adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 28 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Aleksander Roy Happy Hamonangan

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aleksander Roy Happy Hamonangan
Npm : 202220252010
TTL : Jakarta, 23 November 1987
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non_Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul “ **Peniadaan Pidana Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia** “ Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan mengalihmedia/formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 28 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Aleksander Roy Happy Hamonangan

ABSTRAK

Alexsander Roy Happy Hamonangan. 202220252010. Peniadaan Pidana Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia

Dalam rangka penegakan asas legalitas tidak dapat dilepaskan dari komponen dalam perbuatan pidana tersebut yaitu *actus reus* dan *mens rea*. Dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh ASN di Indonesia merupakan tindakan dari hukum administrasi, namun dalam penerapannya terdapat kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Penelitian tesis ini merumuskan permasalahan yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 2/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jap Tanggal 30 April 2021 atas nama Terdakwa Hentje A. E. Rumbewas, S.E selaku bendahara pengeluaran dinas pendidikan di Kabupaten Biak Numfor, Papua, yang melakukan pengajuan anggaran tahun 2015 untuk pelaksanaan di tahun 2016 atas pembayaran insentif guru-guru kontrak di Kabupaten Biak Numfor. Rumusan permasalahan adalah, (1) Bagaimana hilangnya sifat melawan hukum secara pidana dalam tindakan pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh oknum ASN? dan (2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan pengembalian kerugian keuangan negara atas adanya kesalahan tindakan administrasi yang menyebabkan kerugian keuangan negara? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hilangnya sifat melawan hukum secara pidana terhadap tindakan pengembalian dan untuk mengetahui wujud pertanggungjawaban yang efektif terhadap kesalahan administratif tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan.

Hasil temuan penulis adalah a) Praktek yang terjadi dalam penanganan kesalahan administratif masih tetap dilanjutkan pemeriksaannya dalam persidangan tindak pidana korupsi. b) Pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dianggap sebagai hal yang meringankan namun dalam administrasi dianggap sebagai pertanggungjawaban. c) Keberlakuan kedua undang-undang yang berbeda sanksi ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Kesimpulan bahwa (1) sifat melawan hukum dapat hilang yaitu diputuskannya peniadaan pidana dalam tindakan pengembalian kerugian keuangan negara apabila nyata bahwa dalam perbuatan tersebut murni adalah kesalahan administratif dan tidak dilakukan dengan maksud jahat yang dirancang sebagai dasar dari dilakukannya perbuatan. (2) pertanggungjawaban hukum yang tepat dan efisien dalam kesalahan dalam tindakan administrasi yaitu dengan melakukan pengembalian kerugian keuangan negara dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak dikeluarkan hasil pengawasan oleh APIP.

Kata kunci: kesalahan tindakan administratif, pengadaan jasa pemerintah.

ABSTRACT

Alexsander Roy Happy Hamonangan. 202220252010. *Crime elimination against the recovery of state losses committed by state civil servants in procurement activities for goods and services in Indonesia*

In the context of enforcing the principle of legality, it cannot be separated from the components of the criminal act, namely actus reus and mens rea. In the implementation of the procurement of goods and services carried out by ASN in Indonesia, it is an act of administrative law, but in its implementation there are administrative errors that result in state financial losses.

This thesis research formulates the problems that occurred in the Jayapura District Court Decision Number 2 / Pid.Sus-Tpk / 2021 / Pn Jap dated April 30, 2021 on behalf of the Defendant Hentje A. E. Rumbewas, S.E as the treasurer of the education office expenditure in Biak Numfor Regency, Papua, who submitted a 2015 budget for implementation in 2016 for the payment of incentives for contract teachers in Biak Numfor Regency. The formulation of the problem is, (1) How is the loss of the unlawful nature criminally in the action of returning state financial losses that have been carried out by ASN individuals? and (2) How is the legal accountability for the action of returning state financial losses due to administrative errors that cause state financial losses? The purpose of this study is to determine how the loss of the unlawful nature of the criminal act of return and to determine the form of effective accountability for the administrative error. The research method used is normative legal research or literature.

The author's findings are a) The practice that occurs in handling administrative errors is still being examined in the trial of corruption crimes. b) The return of state financial losses in corruption crimes is considered a mitigating factor but in administration it is considered as accountability. c) The application of the two laws with different sanctions causes the absence of legal certainty. The conclusion is that (1) the unlawful nature can be lost, namely the decision to eliminate criminal penalties in the act of returning state financial losses if it is clear that the act is purely an administrative error and is not carried out with malicious intent designed as the basis for the act. (2) proper and efficient legal accountability in errors in administrative actions is by returning state financial losses within a period of 10 (ten) days from the issuance of the results of supervision by APIP.

Key words: *administrative action errors, procurement of government services.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas khadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI) SEBAGAI LEMBAGA MODEL PENYELESAIAN SENGKETA MEDIA DALAM PERSEPEKTIF NEGARA HUKUM”**. Penyusunan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S2) Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan tesis ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada.

1. Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim (HC) selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Univesitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Sugeng, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik, Terima kasih atas motivasi dan saran yang diberikan kepada saya sehingga saya merasa yakin untuk mengambil tesis ini dengan cepat.
5. Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pertama tesis saya, Terima kasih atas bimbingan, saran dan semangat yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan semaksimal mungkin. Semoga bapak selalu diberi kesehatan dan lindungan oleh Allah SWT.
6. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH,MM. selaku Dosen Pembimbing kedua tesis saya, Terima kasih atas bimbingan, saran dan semangat yang diberikan

5. Adiku tercinta Rizky Ayu Jesica Stephanie, S.H., M.H. yang telah membantu dan mendukung abangmu ini menyelesaikan Studi Magister Ilmu Hukumnya

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran berikut kritikan yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat membangun bagi kita semua

Jakarta, 20 Juli 2024

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	10
1.4. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
1.4.1. Kerangka Teoritis.....	11
1.4.2. Kerangka Konseptual.....	21
1.5. <i>Literature Review</i>	35
1.6. Metode Penelitian.....	40
1.7. Sistematika Penulisan.....	41
BAB II KONSEP PENIADAAN PIDANA DAN PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	44
2.1. Pidana, Pemidanaan, dan Peniadaan Pidana.....	44
2.1.1. Pidana.....	44
2.1.2. Pemidanaan.....	46
2.1.3. Peniadaan Pidana.....	51
2.1.3.1. Putusan Hakim.....	51
2.1.3.2. Alasan Penghapus Pidana.....	52

2.2. Tindakan ASN Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara.....	52
2.3. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dan Peniadaan Pidana.....	56
2.3.1. Asas <i>Ultimum Remidium</i>	56
2.3.2. Asas Kepastian Hukum.....	56
2.3.3. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	57
2.3.3.2. Asas <i>Geen Straf Zonder Schuld</i> dan Asas <i>Actus Non Factim Reum Nisi Mens Sis Rea</i>	59
2.3.4. Kerugian Keuangan Negara.....	59
2.3.5. Pengembalian Keuangan Negara.....	60
2.3.6. Peniadaan Pidana Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.....	61
2.3.7. Batas Wilayah Hukum Pidana dan Batas Wilayah Hukum Administrasi dalam Kesalahan Administratif yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara.....	63
BAB III PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENGADAAN JASA TENAGA GURU KONTRAK BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA NOMOR 2/PID.SUS-TPK/2021/PN JAP TANGGAL 30 APRIL 2021.....	67
3.1. Wewenang ASN Dalam Pengambilan Tindakan Administrasi.....	67
3.2. Hubungan Tindakan Administrasi Dengan Kepentingan Umum.....	68
3.3. Kesalahan Dalam Tindakan Administrasi Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara.....	70
3.4. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dengan Peniadaan Pidana.....	74

BAB IV PERTIMBANGAN DAN PENIADAAN PIDANA ATAS PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAS TINDAKAN ADMINISTRATIF YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	77
4.1. Sifat Melawan Hukum Dalam Tindakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.....	77
4.2. Batas Wilayah Kewenangan Hukum Administrasi Dengan Batas Wilayah Kewenangan Hukum Pidana Atas Kerugian Negara Akibat Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Oknum ASN.....	80
4.3 Efektivitas Perbuatan Pengembalian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh Oknum ASN.....	88
4.3.1. Keuangan Negara.....	89
4.3.1.1. Kerugian Keuangan Negara.....	90
4.3.1.2. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.....	91
4.3.1.3. Peniadaan Pidana Terkait Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.....	93
4.2. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Atas Adanya Kesalahan Tindakan Administrasi Negara.....	94
BAB V PENUTUP.....	98
5.1. Simpulan.....	98
5.2. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101